

**KERJASAMA ANTAR DAERAH “SARBAGITA”
MEMPERKUAT POSISI DAERAH DI ERA OTONOMI
DIMENSI REFORMASI ADMINISTRASI DAN GOVERNANCE
Oleh Gede Sandiasa¹**

Abstrak: Kerjasama antar daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Berbagai hambatan administrasi dan pengelolaan sumberdaya di daerah, perlu dilakukan reformasi administrasi dan governance antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan dan pencapaian pendapatan daerah, kerjasama lintas sektoral dan antar daerah, guna dapat menghadapi tekanan nasional serta memfasilitasi arus globalisasi.

Kata Kunci: *SARBAGITA, Governance, kerjasama antar daerah, partisipasi public.*

Pendahuluan

Pendekatan kolaborasi semakin menguat pula dengan trend perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan dalam pelayanan publik secara khusus, yang ditandai dengan adanya pergeseran konsep dari *government* menuju ke konsep *governance*. Salah satu dimensi penting yang ditekankan dalam konsep *governance* adalah interaksi antara *stakeholders* sebagai cerminan proses demokratisasi. Menurut Dwiyanto, Et al, (2003), proses demokratisasi, dituntut ruang publik yang semakin luas bagi aktor-aktor dan *stakeholders* di luar pemerintah untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini diperlukan guna menghasilkan kebijakan publik, baik di bidang pelayanan publik maupun dalam penanganan lingkungan, yang sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Ketiadaan interaksi sebagaimana dimaksud dalam konsep *governance* tentu saja berakibat pada proses kebijakan yang kurang transparan dan kurang responsif terhadap kepentingan publik, yang pada gilirannya akan menghasilkan kebijakan yang tidak memenuhi kriteria responsibilitas dan akuntabilitas publik.

¹ Gede Sandiasa adalah staf edukatif pada FISIP UNIPAS Singaraja.